

SKRIPSI

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN
KANTOR SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN**

*Disusun dan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



**DISUSUN OLEH
NABILA SASKIA
NPM: 185310580**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

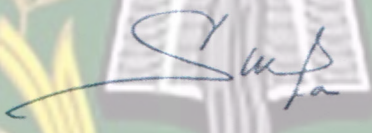


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nabila Saskia
NPM : 185310580
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

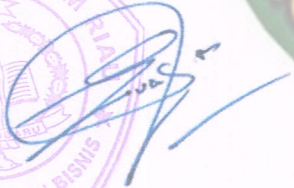
Disahkan Oleh:
PEMBIMBING



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
TELP. (0761) 674681 FAX. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Nabila Saskia
NPM : 185310580
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

Disetujui Oleh:


Tim Penguji:

1. Alfurkaniati, SE., M.Si., AK., CA.
2. Muhammad Fahdi, S.E., M.AK

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

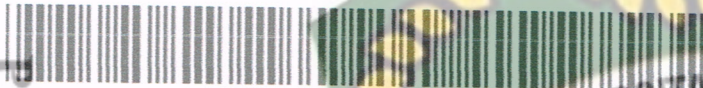
NPM : 185310580
 Nama Mahasiswa : NABILA SASKIA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. SISKA, SE. M.Si., AK., CA 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA KINERJA KEUANGAN KANTOR SATUAN PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN.
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : VALUE FOR MONEY ANALYSIS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF PAMONG PRAJA UNIT OFFICES AND FIRE FIGHTING IN PELALAWAN REGENCY
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	05/11/2021	Perbaiki latar belakang	Perbaiki	
2	11/12/2021	Tambahkan ref. jurnal	Perbaiki	
3	24/12/2021	Perbaiki sistematika penulisan serta bab I	Perbaiki	
4	12/1/2022	Perbaiki latar belakang serta daftar isi	Perbaiki	
5	2/2/2022	Bab II, Bab III	Perbaiki	
6	23/2/2022	Acc Sempurna	Acc Ujian	
7	15/06/2022	Daftar isi, Tabel, tambahkan eksekutifitas	Perbaiki	
8	20/06/2022	Bab IV	Perbaiki	
9	11/07/2022	Daftar isi, Bab IV, tabel	Perbaiki	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

10	13/07 2022	Penelitian terdahulu n. Inlanghan,	Perbaiki	di
11	21/07 2022	Tambahkan tabel pada bab IV,	Perbaiki	di
12	25/07 2022	Acc Semhas	Acc ujian	di

Pekanbaru, 19 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



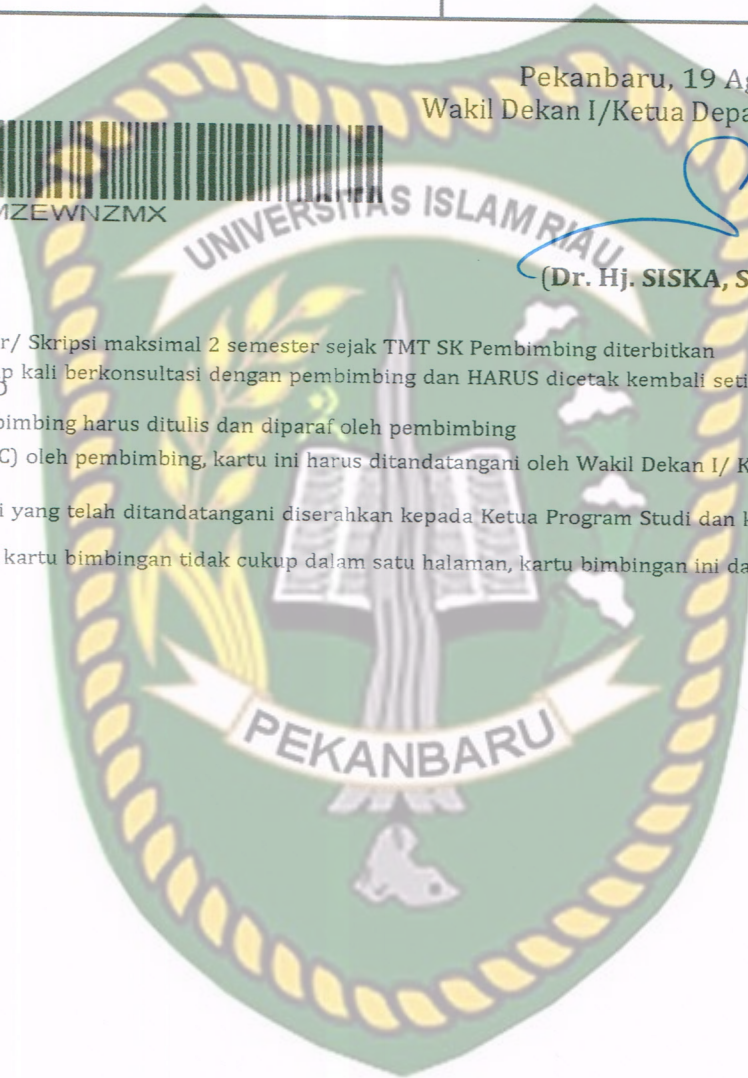
MTG1MZEWNZMX

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

(Dr. Hj. SISKA, SE. M.Si., AK.,)

Catatan:

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 892/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 12 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

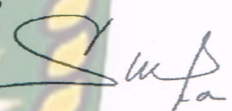
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Nabila Saskia |
| 2. NPM | : 185310580 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja (SATPOL-PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. |
| 5. Tanggal ujian | : 12 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 79,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua





Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
3. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak


(.....)

(.....)

(.....)

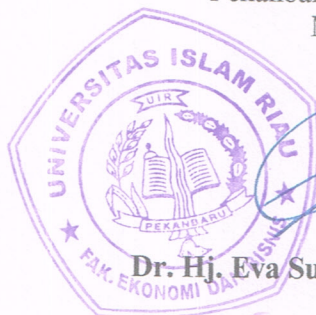
Notulen

1. Nina Nursida, SE., M.Acc


(.....)

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 892 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLP/IL/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

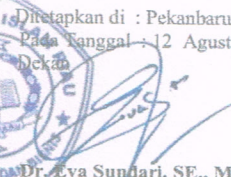
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Nabila Saskia
N P M : 185310580
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja (SATPOL-PP) dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Muhammad Fahdi, SE.,M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b		Notulen
7				Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022
Dekan


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

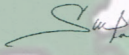
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

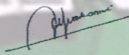
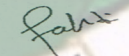
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nabila Saskia
NPM : 185310580
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja (SATPOL-PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.
Hari/Tanggal : Jum'at 12 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 79,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

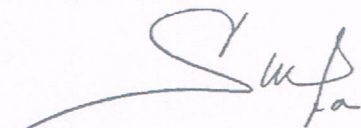
Mengetahui
An.Dekan



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 12 Agustus 2022
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

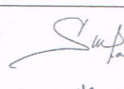


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nabila Saskia
NPM : 185310580
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

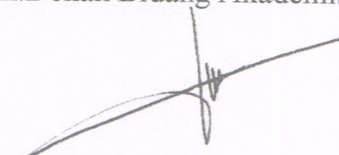
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Anggota	3. 

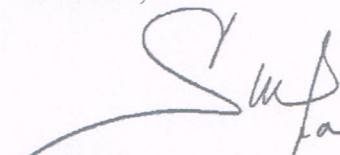
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Maret 2022
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1443/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-11-13 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Nabila Saskia
 N P M : 185310580
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Pamong Praja(SATPOL-PP)di Kabupaten Pelalawan.
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 15 November 2021
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NABILA SASKIA
NPM : 185310580
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN
KANTOR SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 25 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bakwa skripsi dengan judul :

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA KINERJA KEUANGAN KANTOR SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DAN PEMADAM KEBAKARAN KEBUPATEN PELALAWAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 21 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan


SASKIA
NPM: 185310580

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan melalui Prinsip *Value For Money*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datanya. Data yang diminta berupa laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*. Pada tahun 2019, ada 10 program dan 44 kegiatan yang dilakukan, namun tidak ada kegiatan yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Pada tahun 2020, terdapat 10 program dan 39 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 3 dari 39 (7,70%) kegiatan yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Sebaiknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan lebih serius dalam mengoptimalkan kegiatan yang sudah di tetapkan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja intansi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata Kunci : ekonomis, efisiensi, efektivitas, *value for money*, kinerja

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance accountability of the Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan through the principle of value for money. This research is qualitative research. This study uses a data collection technique. The data requested is in the form of a performance report of the government agencies of the Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan and a report on the realization of the budget for the departemen of Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan In 2019 and 2020. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The result of this study indicate that the accountability for the performance of the Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan in 2019 and 2020 has not met the value for money principle. In 2019, there were 10 programs and 44 activities carried out, but none of the activities that met the 3 elements of value for money. In 2020, there were 10 program with 39 activities carried out, only 3 out of 39 activities (7,70%) met the 3 elements of value for money. It is better for the head of the Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan to be more serious in optimizing the activities that have been determined. This, the accountability of the performance of the kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan has not met the value for money principle.

Keyword : economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan dengan judul **“Analisis value for money pada kinerja keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan”**, guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa gelar sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nina Nursida, SE., M. Acc selaku Sekertaris Jurusan Program Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

5. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., AK., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk bersedia membimbing penulis dalam menyempurkan Proposal ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna di kemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
7. Kepada Ibu, Ayah dan Kak Divi atas segala kasih sayang, dukungan, perhatian, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada Nya.
8. Kepada Yudha Pratama yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal.
9. Kepada Dena Aurelia Armadi, Yolanda Fitriani, Nadila, Rahmi Meliyandini, Hafizah ulfah teman seperjuangan sejak SMP dan SMA yang selalu ada untuk penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta selalu memberikan saran terbaik, Bantuan, semangat serta memotivasi penulis dalam menulis Proposal ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan selama kuliah ini untuk Ega, Kumal, Yola, Cipeng, Jair, Ucir dan Mijan terima kasih telah memberikan bantuan, semangat serta motivasi kepada penulis.

Pekanbaru, 8 Maret 2022

Nabila Saskia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	14
2.1 <i>Value For Money</i>	14
2.1.2 Indikator <i>Value For Money</i>	16
2.1.3 Tujuan <i>Value For Money</i>	16
2.1.4 Langkah- Langkah Pengukuran <i>Value For Money</i>	18
2.2 Kinerja Keuangan	22

2.2.1 Pengertian kinerja dan Pengukuran Kinerja	22
2.2.2 Pengertian Pengukuran Kinerja	24
2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	25
2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	25
2.2.5 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja	27
2.2.5 faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja	28
2.2.6 Kendala Pengukuran Kinerja.....	28
2.3 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian	36
4.2 Hasil Perhitungan Value For Money Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dan 2020	37
4.3 Pembahasan Analisis <i>Value For Money</i> Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pengukuran Value For Money18



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2019-2020	5
Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Tahun 2019	5
Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2020	7
Tabel 3. 1 Kriteria Ekonomis	32
Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi	33
Tabel 3. 3 Kriteria Efektivitas	34
Tabel 4 1 Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2019	38
Tabel 4 2 Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2020	43
Tabel 4 3 Hasil Perhitungan Efisiensi	48
Tabel 4 4 Hasil Perhitungan Efisiensi 2020	51
Tabel 4 5 Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2019	55
Tabel 4 6 Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2020	59
Tabel 4 7 Kriteria Ekonomis Tahun 2019 dan 2020	62
Tabel 4 8 Kegiatan Yang Tidak Ekonomis	63
Tabel 4 9 Kriteria Efisiensi Tahun 2019 dan 2020	63
Tabel 4 11 Kegiatan Yang Tidak Efisien	64
Tabel 4 11 Kriteria Efektivitas Tahun 2019 dan 2020	64
Tabel 4 13 Kegiatan yang tidak Efektif Tahun 2019 dan 2020	66

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi Indonesia mendorong beralihnya sistem penganggaran sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, didukung oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Anggaran di berikan dengan tujuan terlaksananya standar pelayanan publik di berbagai daerah dan memanfaatkan sumber daya. Tujuan anggaran sendiri ialah sebagai alat untuk memonitoring kegiatan pemerintah dan perencanaan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik dengan mengukur melalui satuan mata uang sekaligus juga sebagai pengendali terlaksananya kegiatan publik. Adanya asas otonomi ini ditunjukkan untuk mempercepat tujuan dari daerah tersebut dengan terwujudnya daya saing yang tetap dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi dalam suatu daerah.

Pemberian otonomi luar kepada daerah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kristanti (2016) mengatakan bahwa tugas umum pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat, tidak dapat ditinjau dari kesejahteraan material saja dapat juga kita lihat dari non-

material. Seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, pariwisata, fasilitas umum dan lain-lain merupakan beberapa faktor dari non material tersebut.

Kinerja Pemerintah sangat menjadi sorotan bagi masyarakat. Tingginya kesadaran dalam hal penyelenggaraan administrasi publik sehingga sering menilai organisasi sektor publik sebagai inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dan dalam hal ini menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembag-lembaga sektor publik.

Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance* yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari anggaran pendapatan daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan cara menengembangkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Salah satu cara mengevaluasi kinerja keuangan dengan cara mempertimbangkan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep *value for money*.

Value for money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Ekonomi ialah (hemat/tepat guna) sering disebut pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi (daya guna) memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Dan proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*). Efektivitas (hasil guna) berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kinerja dapat dikatakan telah efektifitas apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Keterkaitan akuntabilitas dan transparansi pada penganggaran di Indonesia berperan penting tercapainya pemerintah yang baik yang biasa di sebut *good governance*. Selain akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran berjalan dengan baik dengan menggunakan konsep efisiensi, efektifitas dan ekonomis (Purnomo & Putri, 2018).

Efisiensi merupakan komparasi antara output dan input (Mardiasmo, 2019), maksudnya ialah aktivitas dari segala kegiatan dan pelaksanaan program menggunakan anggaran secara efisien, dengan artian bahwa ketika kontribusi atas keluaran yang di peroleh memiliki kesetaraan dengan masukan yang kurang dari sama dengan keluaran. Efektif, efisien dan ekonomis merupakan elemen utama dari prinsip *value for money* dalam pengelolaan dikatakan baik ketika anggaran

tersebut mampu menggambarkan konsep seperti *value for money* (Purwiyanti, 2017).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah salah satu instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang kententraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta penanggulangan kebakaran di Kabupaten Pelalawan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk memperoleh target kinerja secara menyeluruh dalam peleksanaan program.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan kosep *Value For Money*, terhadap beberapa aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas seluruh program kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat dilihat pada data akuntabilitas kerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan oleh Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1. 1

Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2019-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
2019	Rp. 18.735.566.080,-	Rp.11.416,216,390,-	60,9 %
2020	Rp. 13.684.051.043,	Rp.11.594.890.413,-	84 %

Sumber : LAKIP satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran 2019-2020

Pandemi yang terjadi pada tahun 2019 memberikan dampak terhadap anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga terjadinya penurunan anggaran. Terlihat pada tabel di atas, anggaran belanja mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp. 18.735.566.080 dan tahun 2020 dengan nilai Rp.13.684.051.043. Namun, capaian kinerja meningkat di tahun 2019 terjadinya kebakaran pemukiman, hutan dan lahan sebanyak 357 kejadian di tahun 2020 sebanyak 196 kejadian.

Tabel 1. 2

Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp.4.326.943.000,-	Rp.4.055.441.817,-	93,16
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.1.074.790.000,-	Rp.825.029.467,-	76,76
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.536.971.000,-	Rp.476.026.100,-	88,65
4.	Program Peningkatan	Rp.186.916.000	Rp.185.816.000	99,41

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	,-	,-	
5.	Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.	Rp.9.880.000,-	Rp.9.880.000,-	100,00
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.3.305.564.080,-	Rp.3.165.959.748.00,-	95,78
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.505.565.000,-	Rp.463.190.000,-	91,62
8.	Program Pembinaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.598.850.000	Rp.591.345.178,-	98,75
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp.296.785.000,-	Rp.207.349.000,-	69,87
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Rp.7.893.302.000,-	Rp.1.436.179.080,-	18,19
	JUMLAH TOTAL	Rp.18.735.566.080,-	Rp.11.416.216.390,-	83,21

Sumber: LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di

Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Presentase program dengan nilai di bawah 80% merupakan masalah, karena tidak mencapai target ekonomis, efisiensi dan efektivitas menurut konsep *value for money* dapat dilihat pada tabel 1.2, terdapat 2 program yang menunjukkan presentase dibawah (80%) yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan dengan presentase (69,87%) dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan presentase (18,19%).

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 adalah Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan presentase (100%) dan presentase program dengan realisasi anggaran terendah di tahun 2019 adalah Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan (18,19%).

Tabel 1. 3

Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp.4.218.226.151,-	Rp.3.921.405.955,-	92,96
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.532.634.730,-	Rp.520.236.110,-	97,67
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp.170.062.500	Rp.131.637.500	77,41

	Aparatur	,-	0,-	
4.	Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.	Rp.12.891.000,-	Rp.9.880.000,-	76,64
5.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp.3.630.554.400,-	Rp.3.165.959.748,-	87,20
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.165.870.000,-	Rp.153.121.000,-	92,31
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.505.130.000,-	Rp.497.567.600,-	98,50
8.	Program Pembinaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.653.610.000,-	Rp.646.583.200,-	98,92
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp.207.080.000,-	Rp.207.349.000,-	100,13
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Rp.3.587.992.262,-	Rp.2.341.150.300,-	65,25

JUMLAH TOTAL	Rp.13.684.051. 043,-	Rp.11.594.890 .413,-	78,84
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Sumber : LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.3, pada tahun 2020 ditemukan program kinerja yang di bawah (80%) sebanyak 3 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (77,41%), Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah (76,64%) dan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (65,25%). Dengan nilai rata-rata capaian kinerja Pada tahun 2020 dengan presentase (78,84%) menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sehingga rata-rata keseluruhan program kinerja tidak mencapai target.

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2020 adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan presentase (100,13%) dan untuk program dengan realisasi anggaran terendah di 2020 adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan presentase (65,25).

Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 dan 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan terdapat 10 program yang dijalankan yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program

Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pembinaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Dari 10 program di atas yang dijalankan di Tahun 2019 ditemukan 2 program dan Tahun 2020 ditemukan 3 program yang belum mencapai sasaran. Dan untuk tahun 2020 program kinerja secara keseluruhan tidak mencapai target. Yang terlihat pada tabel 1.2 dan 1.3, hal ini disebabkan oleh minimnya peyerapan dana anggaran kegiatan/program sehingga diperlukan pengukuran komprehensif. Maka, diperlukanya konsep *Value for Money* untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Sehingga peneliti ingin meneliti kinerja keuangan pada kantor satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan sudah terealisasikan dengan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul **“Analisis *value for money* Pada Kinerja Keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Palalawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari sisi *Value For Money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian “Analisis *Value For Money* pada kinerja Keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan” bertujuan: Mengetahui kinerja keuangan ditinjau dari sisi *Value For Money* meliputi aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money*.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan program/ kegiatan di masa depan dapat berjalan ekonomis, efisien dan efektif.

3. Peneliti yang sama

Hasil penelitian ini dapat digunakan sumber bacaan dan memberi tambahan pengetahuan khususnya dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan melalui pendekatan *value for money*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan secara singkat mengenai isi laporan penelitian di wilayah kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan yang meliputi latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang di peroleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur mengenai *value for money* untuk selanjutnya sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian yang berkaitan dengan kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 - 2020 agar dalam menganalisis data lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam pengambilan keputusan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian peneliti tentang analisis *value for money* pada kinerja keuangan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 *Value For Money*

1.1.1 **Pengertian *Value for Money***

Menurut Mardiasmo (2018) *Value For Money* konsep yang digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan, Menurut Arisaudi (2016) *value For Money* ialah sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, Menurut Halim et al (2014) *Value For Money* merupakan konsep dalam mengukur kinerja dari program, kegiatan serta organisasi apakah telah ekonomis.

Dimana pengertian masing-masing tersebut adalah :

a. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2018) ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa dengan harga terbaik yang di mungkinkan (*spending less*) dan memiliki kualitas tertentu. Dalam pengertian ekonomi sendiri bisa disebut penggunaan dana yang hemat atau tepat guna dan kehematan tersebut dalam mengelola secara hati-hati atau cermat (*prudence*) serta tidak menimbulkan pemborosan. Sedangkan, Menurut Sari R. Et al (2015) “ ekonomis, merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.” ekonomis erupakan perbandingan *input* dengan kualitas tertentu dengan *input value* yang

dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi juga mengetahui sejauh mana organisasi-organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros serta tidak produktif. Ekonomis sendiri memiliki arti yaitu sumber daya *input* seharusnya digunakan secara hemat dengan cara menggunakan harga yang rendah namun memiliki kualitas yang baik. Indikator dari ekonomis ialah input.

b. Efisiensi

Suatu program dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*).

Menurut Mardiasmo (2018) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas.”

Maknanya ialah bahwa efisiensi sendiri ketika sumber daya dalam unit organisasi menghasilkan kinerja yang produktif yakni berjalan dengan sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak terdapat pengeluaran yang boros. Pengukuran pada efisien sendiri dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang di hasilkan dengan *input* yang telah digunakan (*cost output*).

Indikator pada efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan dan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

c. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas ialah hubungan dalam mencapai tujuan dan hasil berupa kebijakan yang memiliki terget tertentu. Efektivitas juga

dapat dikaitkan antara *output* berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu dicapai. Aktivitas operasional dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan mencapai target dari suatu kebijakan (*spending wisely*). Kinerja organisasi sendiri dapat dikatakan baik jika, semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran maka semakin efektif kerja dari suatu unit organisasi.

2.1.2 Indikator Value For Money

Indikator kinerja berperan dalam menyediakan informasi sebagai bagian dari pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009) Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan dari pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan publik dengan efisiensi biaya. Dengan kata lain indikator kinerja dapat memberikan petunjuk serta perhatian dalam melakukan perbaikan. Sedangkan, pihak eksternal menggunakan indikator kinerja guna untuk mengawasi serta sebagai sumber informasi dalam mengukur akuntabilitas publik. Indikator publik juga membantu para manajer publik dalam melihat tingkat pencapaian publik program dan dapat mengidentifikasi masalah yang akan datang.

2.1.3 Tujuan Value For Money

Menurut Mardiasmo (2009) “Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat

mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *Value For Money*, yaitu ekonomis: (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (*maximizing benefit and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.”

Dapat disimpulkan dari tujuan di atas bahwa penerapan *Value For Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu dalam suatu insatansi pemerintah tujuannya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan sesuai sasaran hal ini untuk mendorong terciptanya pelayanan yang baik dengan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien.

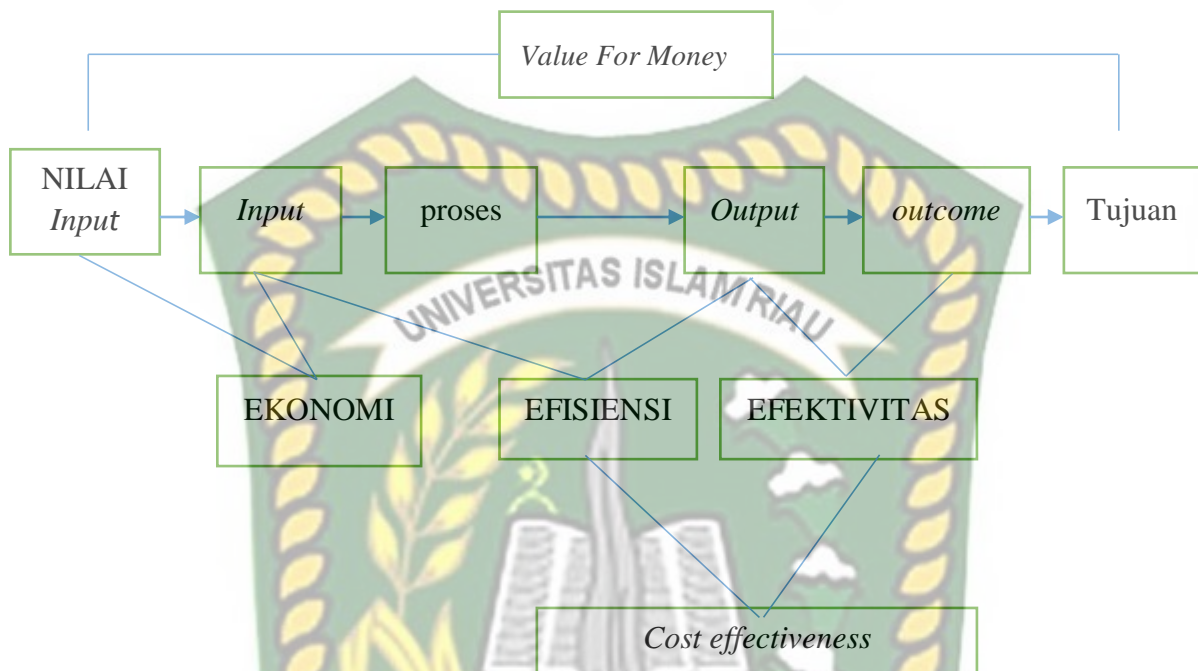
Tujuan lain yang dikehendaki terkait penerapan *Value For Money* ialah

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, maksudnya ialah pelayanan yang diberikan tepat sesuai sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2. Gambaran Skematis

Secara skematis, *Value For Money* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Alur Pengukuran Value For Money



(Mardiasmo, 2018)

2.1.4 Langkah- Langkah Pengukuran *Value For Money*

Dalam mengukur kinerja dengan metode *Value For Money*, langkah – langkah dalam melakukan pengukuran adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis ini hanya mempertimbangkan masukan yang di gunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan seputar pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut.

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?

- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis?
- c. Apakah biaya organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Menurut Mardiasmo (2018) elemen ekonomi diukur dengan membandingkan *input* atau masukan dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

$$ekonomis = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Anggaran input yang dimaksud adalah angka realisasi yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Nilai input : Anggaran

Angka nilai inpt yang dimaksud adalah angka target anggaran yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2. 1
Kriteria Ekonomis

Presentase Pengukuran	Kriteria
<100%	Ekonomis atau sangat ekonomis
=100%	Ekonomis berimbang
>100%	Tidak ekonomis

Sumber : Mahsun (2013)

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan

rasio antara *output* dengan *input*. Apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat Efisiensi suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo (2018) Adapun elemen efisiensi diukur dengan membandingkan *output* dengan *input* yang kemudian dihubungkan dengan target yang sudah ditentukan.

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Presentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah presentase capaian fisik dari program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Input : Presentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2. 2
Kriteria Efisiensi

Presentase Pengukuran	Kriteria
<100%	Tidak efisien
=100%	Efisien berimbang
>100%	Efisien atau sangat efisien

Sumber : Mahsun (2013)

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018) Efektivitas suatu organisasi diukur dengan membandingkan *outcome* dan *output*. Efektivitas ini dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ialah perbandingan antara *output* dan *outcome*. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dinyatakan telah melaksanakan program dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. efektivitas juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2. 3

Kriteria Efektivitas

Presentase Pengukuran	Kriteria
<100%	Tidak Efektif
= 100%	Efektif Berimbang
>100%	Efektif atau Sangat Efektif

Sumber : Mahsun (2013)

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang terkait mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Karena *value for money*

merupakan salah satu cara mengukur kinerja keuangan, maka menurut Mohammad Mahsun (2012) kinerja adalah mengenai suatu gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program serta kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*). Menurut Amir dalam (Masrukin, Hubies, & Wijayanto, 2018) berpendapat bahwa kinerja adalah perilaku atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam kaitannya dengan tugas kerja di perusahaan, departemen, atau organisasi, dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi organisasi, masyarakat luas atau bagi diri sendiri.

Istilah kinerja sendiri sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu ataupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria –kriteria ini juga berupa tujuan dari individu atau kelompok individu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin berjalan karena tidak memiliki tujuan atau pencapaian dari individu atau kelompok individu. Menurut Fahmi (2014), mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti halnya dalam membuat laporan keuangan harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku dalam akuntansi yaitu SAK (Standar Akuntansi Indonesia) atau GAAP (*generally Accepted Accounting Principles*) dan lainnya (Sipahelut, Murni & Rate 2017).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui oleh pihak tertentu sebagai tingkat keberhasilan pencapaian dari suatu organisasi yang sejalan dengan visi yang ada pada suatu organisasi. Serta kinerja dapat menjelaskan bagaimana keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan dan standar yang tepat menjadi target sebelumnya.

2.2.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur pencapaian atau keberhasilan dalam suatu organisasi harus dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan dengan *input* (masukan) program, tetapi juga keluaran-manfaat dari program tersebut.

Menurut Sari R *et. al.* (2015) “ Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.” akuntabilitas pimpinan publik dapat dikatakan berhasil apabila *output* yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tindakan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada suatu organissasi.

Adanya pengukuran kinerja maka kita dapat mengetahui pengambilan keputusan yang seperti apa yang tepat dan objektif. Dari beberapa definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu metode atau alat yang digunakan dalam mencatat dan menilai seberapa besar

pencapaian kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui seberapa besar kualitas pengambilan keputusan, kemajuan suatu unit organisasi dan akuntabilitas.

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Suksesnya suatu unit organisasi, program dan kegiatan dapat diukur dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*)
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Tercapainya misi sektor publik pengukuran kinerja berguna untuk mengetahui seberapa suksesnya kinerja atau program yang telah dibuat. Sementara dari prespektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Menurut Mardiasmo (2012) Pengukuran Kinerja bertujuan :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran guna untuk mengukur kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengevaluasi pada proses pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan sasaran kinerja dan melakukan tindakan korektif dalam hal memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar memberikan penghargaan dan hukuman (*reward*) dan (*punishment*) secara objektif dalam pencapaian prestasi yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi pada bawahan serta pimpinan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi maupun program kegiatan.
- f. Membantu mengidentifikasi terhadap kepuasan pelanggan yang terpenuhi.
- g. Membantu dalam memahami proses dilaksanakan kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Dari manfaat pengukuran kinerja diatas, dapat disimpulkan pengukuran kinerja sektor publik memiliki dua fungsi utama dan saling terkait yaitu sumber pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta pendorong akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tuntutan hukum.

Efriyanti, Anggraini dan Fiscal (2012), mengatakan manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentu kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.

2.2.5 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Mohammand (2009), Pengukuran Kinerja memiliki Aspek-Aspek sebagai berikut:

1. Masukan (*input*) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran.
2. Proses (*process*) : ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Keluaran (*output*) : sesuatu yang diharapkan langsung dapat dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Hasil (*outcome*) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

5. Manfaat (*benefit*) : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negative.
6. Dampak (*impact*) : pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. (*Repowatu & Tirayoh, 2016*).

2.2.5 faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja

Keberhasilan sektor publik tentu saja berdampak baik bagi unit organisasi tersebut untuk menentukan keberhasilan tersebut maka harus adanya pengendalian kinerja salah satu cara untuk mengendalikan kinerja ialah dengan melakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja tentunya harus tepat dan ada faktor yang memicu keberhasilan dalam pengukuran kinerja.

Menurut Bastian (2006) agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.
2. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*on-going process*).
3. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.

Sektor publik merupakan sektor yang mengalami tekanan untuk terus dapat meningkatkan kegiatannya dan memberikan produk layanan secara lebih efisien dan dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan untuk pembayaran pajak.

2.2.6 Kendala Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan mencatat dan mengukur pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menilai keberhasilan dalam kinerja. Namun

untuk melakukan pengukuran kinerja tentunya terdapat kendala dalam pengukurannya.

Menurut Bastian (2006) kendala pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
2. Sifat *output* adalah kualitatif, *intangible* dan *indirect*.
3. Antara *input* dan *output* tidak mempunyai hubungan secara langsung (*discretionary cost center*).
4. Sehingga memerlukan instrument pengganti mekanisme pasar.
5. Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat).

Organisasi sektor publik tidak hanya menggunakan ukuran laba untuk mengukur keberhasilan organisasi karena memang tujuan organisasi sektor publik bukan untuk memperoleh laba akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, *output* organisasi sektor publik pada umumnya bersifat *intangible* dan *indirect* yang menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengukuran kinerja.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu Akuntabilitas Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan belum memenuhi prinsip *value for money*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan Desain Penelitian Kualitatif. Penelitian yang merupakan data yang disusun sedemikian rupa kemudian di analisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pelalawan jika ditinjau menggunakan konsep *Value For Money* dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan 2019-2020 sehingga penulis mendapat gambaran yang jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan, Jalan Pamong Praja No.1, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Riau. Peneliti melakukan penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan karena peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pada SatuanPolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan telah ekonomis, efisien dan efektif.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *Value for Money*. *Value for Money* sendiri merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya *input* sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*sepending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Menurut Mardiasmo (2018) Tingkat ekonomis dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Presentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah presentase capaian fisik dari program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Input : Presentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan

Tabel 3. 1
Kriteria Ekonomis

Presentase pengukuran	Kriteria
<100%	Ekonomis atau sangat ekonomis
=100%	ekonomis berimbang
>100%	Tidak ekonomis

Sumber :Mahsun (2013)

2. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pencapaian output maksimum dengan input tertentu (Puriwiyanti, 2017). Efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Menurut Mardiasmo (2018) tingkat efektifitas dapat dihitung menggunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Presentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah presentase capaian fisik dari program-program yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan.

Input : Presentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah presentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan

Tabel 3. 2
Kriteria Efisiensi

Presentase pengukuran	kriteria
<100%	tidak efisien
=100%	efisien berimbang
>100%	efisien atau sangat efisien

Sumber : Mahsun (2013)

3. Efektivitas

Efektivitas (berhasil guna) dalam artian mencapai sasaran atau tujuan, efektivitas erat kaitanya dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2018) tingkat efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan

Tabel 3.3
Kriteria Efektivitas.

Presentase Pengukuran	Kriteria
<100%	Tidak Efektif
=100%	Efektif berimbang
>100%	efektif atau sangat efektif

Sumber : Mahsun (2013)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data Primer. Data Primer yaitu data-data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperoleh secara langsung tanpa prantara dan tidak dipublikasikan ke khalayak umum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dan literatur jurnal dengan analisis *Value For Money* sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan analisis dokumen, dengan cara mengumpulkan informasi berupa dokumen, buku-buku, jurnal atau sumber data tertulis lainnya seperti teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya.

Laporan penelitian ini peneliti dapatkan dari laporan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 dan 2020.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara kuantitatif berdasarkan *Value for Money*.

“Analisis data yang digunakan dalam mengukur penilaian kinerja pelayanan publik adalah dengan menggunakan konsep *Value For Money* dalam tinjauan pusatka Mardiasmo (2018) menyatakan tiga elemen pengukuran *Value For Money* yaitu pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas.

Dari pengukuran tiga elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan lalu melakukan analisis dari hasil perhitungan tersebut apakah kinerja keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan sudah baik atau belum, Peneliti mendapatkan informasi dari laporan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan merupakan instansi mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini menjadi urusan wajib, sebagaimana tertera dalam pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “ Penyelenggara Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Pada pasal 255 dan 256 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dinyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bertugas membantu kepada daerah dalam menegakan peraturan daerah. Peran satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakan peraturan pemerintah daerah dan keputusan kepala daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting.

Peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 10 tahun 2012 tentang organisasi dan tata satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta penanggulangan kebakaran. Kantor Satuan polisi Pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan memiliki misi dan visi yaitu : “

Terwujudnya profesionalisme polisi pamong praja dalam rangka penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat guna memantapkan sinergi pembangunan menuju pelalawan emas”.

Untuk mewujudkan strategi keberhasilan pencapaian visi dan misi, maka ditetapkan tujuan dari strategi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pelalawan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat yang adil dan merata
3. Menurunkan jumlah kejadian kebakaran.

Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- b. Penegakan peraturan daerah
- c. Penanggulangan kebakaran

4.2 Hasil Perhitungan Value For Money Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dan 2020

Setiap instansi pemerintah memiliki program sesuai dengan visi misi yang ada pada instansi tersebut guna mewujudkan tujuan dari instansi tersebut.

Intansi pemerintah tentunya memiliki program- program kerja untuk mencapai visi misi organisasi tersebut. Program dapat terlaksana dengan tentu membutuhkan anggaran agar terlaksananya program kerja yang baik. Kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pelalawan mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah kabupaten pelalawan yang sudah di atur dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat 3 elemen utama dalam perhitungan value for money, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas .

1. Ekonomis

Menurut mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat ekonomis yaitu :

$$ekonomis = \frac{input}{nilai\ input} \times 100\%$$

Dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan. Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan tahun 2019.

Tabel 4 1

Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2019

No	Nama program	Kegiatan	Realisasi (RP)	Anggaran (RP)	Ekonomis
1	Program Pelayanan	Pelayanan Jasa Surat	5,580.000.00	5,580.000.00	100%

Administrasi Perkantoran	Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,533,085. 00	195,600,000 .00	57,54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasio nal	4,987,000.00	28,950,000. 00	17,22%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	63,413,000.0 0	66,167,000. 00	95,84%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45,507,000.0 0	48,577,000. 00	93,67%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33,387,000.0 0	41,395,000. 00	80,66%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	6,805,000.00	24,000,000. 00	28,36%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,800,000.0 0	105,000,000 .00	79,81%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24,000,000.0 0	24,200,000. 00	99,18%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,000,000.0 0	18,000,000. 00	100%
	Rapar Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan	330,841,500. 00	330,930,000 .00	99,74%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		Keluar Daerah			
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	3,291,671,232.00	3,403,600,000.00	96,71%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	34,944,000.00	34,944,000.00	100%
2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	199,051,401.00	200,000,000.00	99,5%
		Pengadaan Mebelur	29,689,000.00	29,940,000.00	99,16%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	19,997,000.00	20,000,000.00	99,98%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	74,900,000.00	75,000,000.00	99,86%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	487,117,066.00	721,750,000.00	67,48%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor	14,275,000.00	28,100,000.00	50,80%
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150,346,900.00	155,685,000.00	96,57%
		Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapannya	325,679,200.00	381,286,000.00	85,41%
4	program peningkatan kapasitas sumber	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	121,700,000.00	122,800,000.00	99,10%

	daya aparatur	ya Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapann ya	64,116,000.0 0	64,116,000. 00	100%
5	program perencanaa, peningkatan ,pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	5,000,000.00	5,000,000.0 0	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4,880,000.00	4,880,000.0 0	100%
6	program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan	pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	497,595,000. 00	497,680,000 .00	99,98%
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	469,995,300. 00	470,000,000 .00	99,99%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	412,385,000. 00	442,400,000 .00	93,21%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	84,324,368.0 0	86,555,000. 00	97,42%
		penyelidikan intelijen	124,975,000. 00	125,000,000 .00	99,98%
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pi lpres	239,640,000. 00	249,910,000 .00	95,89%
		peningkatan pengamanan linmas pemilu	410,665,080. 00	422,889,080 .00	97,10%

7	program pembinaan pengembangan aparatur	penyelenggaraan kegiatan korp musik satpol pp	218,960,000.00	219,905,000.00	99,57%
		pengawasan petugas tindak internal	123,800,000.00	127,000,000.00	97,48%
		pemantapan jiwa korsa	120,430,000.00	158,660,000.00	75,90%
8	program pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	penyelenggaraan kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda	277,195,178.00	284,050,000.00	97,58%
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	137,190,000.00	137,220,000.00	99,97%
		penyelenggaraan kegiatan sekretariat PPNS	176,960,000.00	177,580,000.00	99,65%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	142,794,000.00	149,960,000.00	95,22%
		penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran	64,555,000.00	146,825,000.00	43,96%
10	program pencegahan penaggulan kebakaran hutan	pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	48,845,600.00	5,957,320,000.00	0
		pendirian posko lapangan	0	155,072,000.00	0%
		pelatihan/pembekalan/in house/tranining/ penyegaran/bin	450,470,000.00	837,250,000.00	53,80%

	tek			
	pemadaman langsung	936,863,480.00	943,660,000.00	99,27%

Berdasarkan tabel 4.3, menjelaskan bahwa terdapat 37 kegiatan ekonomis, 6 kegiatan dengan kriteria ekonomis berimbang dan 2 kegiatan tidak ekonomis.

Penelitian juga melakukan perhitungan ekonomis pada tahun 2020. Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di kabupaten Pelalawan tahun 2020.

Tabel 4 2
Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2020

No	Nama program	Kegiatan	Realisasi (RP)	Anggaran (RP)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	2,700.000.00	5,589.000.00	48,30%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,819,500.00	176,876,162.00	71,13%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	0.00	49,984,089.00	0%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64,974,000.00	67,000,000.00	96,97%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	46,740,800.00	56,668,400.00	82,48%
		Penyediaan Barang	38,610,750.00	49,687,500.00	77,70%

		Cetakan dan Penggandaan			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,882,000.00	24,976,000.00	19,54%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,071,050.00	37,945,100.00	84,51%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23,760,000.00	23,850,000.00	99,62%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	17,600,000.00	17,600,000.00	100%
		Rapar Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	235,505,000.00	352,390,000.00	66,83%
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	3,318,086,855.00	3,344,760,000.00	99,20%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	10,656,000.00	10,899,900.00	97,67%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana apartur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	517,366,110.00	525,384,730.00	98,47%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	2,870,000.00	7,250,000.00	39,58%
3	program peningkatan kapasitas	Bimbingan teknis implementasi	117,775,000.00	156,195,000.00	75,40%

	sumber daya aparatur	peraturan perundang-undangan			
		peningkatan kinerja sumber daya aparatur	13,862,500.00	13,867,500.00	99,96%
4	program perencanaan, peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	5,361,000.00	5,361,000.00	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7,530,000.00	7,530,000.00	100%
5	program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	2,118,960.00	2,419,934.400.00	87,56%
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	319,855,000.00	329,855,000.00	96,96%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	326,135,000.00	368,770,000.00	88,43%
		penyelidikan intelijen	69,375,000.00	69,850,000.00	99,31%
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pilpres	102,955,000.00	110,405,000.00	93,25%
6	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	penyuluhan tentang perlindungan masyarakat	7,340,000.00	7,340,000.00	100%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	72,450,000.00	72,450,000.00	100%
		penyelenggara	73,331,000.00	86,080,000.00	85,18%

		tugas linmas	0	0.00	
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	penyelenggara kegiatan korp musik satpol pp	377,653,600.00	378,870,000.00	99,67%
		pengawasan petugas tindak internal	79,800,000.00	81,320,000.00	98,13%
		pemantapan jiwa korsa	40,114,000.00	44,940,000.00	89,26%
8	program pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	penyelenggaraan kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda	213,335,000.00	218,235,000.00	97,75%
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	188,885,000.00	188,930,000.00	99,97%
		penyelenggaraan kegiatan sekretariat PPNS	244,363,200.00	246,445,000.00	99,15%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	61,425,000.00	70,125,000.00	87,59%
		penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	46,845,000.00	48,605,000.00	96,37%
		penyelenggara kegiatan pemadam kebakaran	87,395,000.00	88,350,000.00	98,91%
10	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan	pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran	1,348,741,000.00	1,910,764,262.00	70,58%

	hutan dan lahan			
	pendirian posko lapangan	54,729,300.00	55,270,000.00	99,02%
	pemadaman langsung	937,680,000.00	1,621,958,000.00	57,81%

Berdasarkan tabel 4.4, bahwa di tahun 2020 terdapat 33 kegiatan dengan kriteria ekonomis, 5 kegiatan ekonomis berimbang dan 1 kegiatan tidak ekonomis.

2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Dimana output merupakan presentase capaian fisiki dan input merupakan presentase capaian keuangan yang ditetapkan sebelumnya oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019.

Tabel 4 3

Hasil Perhitungan Efisiensi

No	Nama program	Kegiatan	capaian fisik (%)	capaian keuangan (%)	efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	57,53%	173,82%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	100%	17,23%	580,38%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	95,84%	104,34%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	93,68%	106,74%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	80,65%	123,99%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	28,35%	352,73%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	79,81%	125,29%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	99,17%	100,03%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%
		Rapar Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100%	99,97%	100,03%

		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	100%	96,71%	103,40%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%
2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	100%	99,53%	100,47%
		Pengadaan Mebelur	100%	99,16%	100,84%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%	99,99%	100,01%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	99,87%	100,13%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	67,49%	148,17%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	100%	50,80%	196,85%
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	96,57%	103,55%
		Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapannya	100%	85,42%	117,06%
4	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	99,10%	100,90%
		Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapannya	100%	100%	100%
5	program perencanaan, peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	100%	100%	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
6	program peningkatan	pengendalian kebisingan dan	100%	99,98%	100,02%

	keamanan dan nyaman lingkungan	gangguan kegiatan masyarakat			
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	100%	100%	100%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	100%	93,22%	107,27%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	100%	97,42%	104,50%
		penyelidikan intelijen	100%	99,98%	100,02%
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pilpres	100%	95,89%	104,28%
		peningkatan pengamanan linmas pemilu	100%	97,11%	102,29%
7	program pembinaan pengembangan aparatur	penyelenggaraan kegiatan korp musik satpol pp	100%	99,57%	100,43%
		pengawasan petugas tindak internal	100%	97,48%	102,58%
		pemantapan jiwa korsa	100%	75,90%	131,75%
8	program pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	penyelenggaraan kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda	100%	97,59%	102,46%
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	100%	99,98%	100,02%
		penyelenggaraan kegiatan sekretariat PPNS	100%	99,65%	100,35%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	100%	95,22%	105,01%
		penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran	100%	43,97%	227,42%
10	program pencegahan	pengembangan sarana dan	100%	82%	121,95%

penaggulangan kebakaran hutan	prasarana pengendalian kebakaran hutan dan			
	pendirian posko lapangan	100%	-	
	pelatihan/pembekalan/in house/tranining/ penyegaran/bintek	100%	53,80%	185,87%
	pemadaman langsung	100%	99,28%	100,72%

Berdasarkan tabel 4.5, bahwa pada tahun 2019 terdapat 36 kegiatan dengan kriteria efisien, 7 kegiatan efisien berimbang dan 1 kegiatan tidak efisien.

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada tahun 2020. Berikut perhitungan efisiensi kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2020.

Tabel 4 4
Hasil Perhitungan Efisiensi 2020

No	Nama program	Kegiatan	capaian fisik (%)	capaian keuangan (%)	efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	48,31%	206,99%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	71,13%	140,58%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	100%	0%	0
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	96,98%	103,11%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	82,48%	121,24%

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	77,71%	128,68%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	19,55%	511,505
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	84,52%	181,31%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	99,62%	100,38%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100%	66,83%	149,63%
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	100%	99,20%	100,80%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	97,76%	102,29%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana apartur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	98,47%	101,55%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	100%	39,59%	25258%
3	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	75,40%	132,62%
		peningkatan kinerja sumber	100%	99,96%	100,04

		daya aparatur			
4	program perencanaan, peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	100%	100%	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
5	program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	100%	87,56%	114,20%
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	100%	96,97%	103,12%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	100%	88,44%	113,07%
		penyelidikan intelijen	100%	99,32%	100,68%
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pilpres	100%	93,25%	107,23%
6	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	penyuluhan tentang perlindungan masyarakat	100%	100%	100%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	100%	100%	100%
		penyelenggara tugas linmas	100%	85,19%	117,38%
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	penyelenggara kegiatan korp musik satpol pp	100%	99,68%	100,32%
		pengawasan petugas tindak internal	100%	98,13%	101,90%
		pemantapan jiwa korsa	100%	89,26%	112,03%
8	program	penyelenggaraan	100%	97,75%	102,30%

	pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda			
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	100%	99,98%	100,02%
		penyelenggaraan kegiatan sekretariat PPNS	100%	99,16%	100,84%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	100%	87,59%	114,16%
		penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	100%	96,38%	103,75%
		penyelenggara kegiatan pemadam kebakaran	100%	98,92%	101,09%
10	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan	pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100%	70,59%	141,66%
		pendirian posko lapangan	100%	99,02%	100,98%
		pemadaman langsung	100%	57,81%	172,98%

berdasarkan tabel 4.6, bahwa tahun 2020 terdapat 33 kegiatan dengan kriteria efisien, 7 kegiatan efisien berimbang dan 1 kegiatan tidak efisien.

3. Efektivitas

Menurut mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

$$efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Dimana outcome merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan output merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019.

Tabel 4 5
Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2019

NO	Nama program	Kegiatan	realisasi hasil	rencana hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1035	1175	88%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	3	5	60%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5000	5000	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	1319	1339	98,50%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	685	685	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144	394	36,54%
		Penyediaan	10	10	100%

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11	11	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	100%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1	1	100%
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	12	12	100%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	100%
2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	1	1	100%
		Pengadaan Mebelur	6	6	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1	1	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17	17	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	15	30	50%
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	321	321	100%
		Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta	321	321	100%

		Perengkapannya			
4	program peningkatan sumber daya aparatur	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	1	1	100%
		Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur	40	40	100%
5	program perencanaan, peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	2	2	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2	2	100%
6	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	1095	1095	100%
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	900	900	100%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	12	12	100%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	25	25	100%
		penyelidikan intelijen	732	732	100%
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pilpres	1	1	100%
		peningkatan pengamanan linmas pemilu	1	1	100%
7	program pembinaan pengembangan aparatur	penyelenggaraan kegiatan korp musik satpol pp	12	12	100%
		pengawasan	180	180	100%

		petugas tindak internal			
		pemantapan jiwa korsa	1	1	100%
8	program pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	penyelenggaraan kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda	380	380	100%
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	170	170	100%
		penyelenggaraan kegiatan sekertariat PPNS	40	40	100%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	120	120	100%
		penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran	1	1	100%
10	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan	pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan	12	12	100%
		pendirian posko lapangan	54	54	100%
		pelatihan/pembekalan/in house/tranining/ penyegaran/bintek	48	48	100%
		pemadaman langsung	1900	1900	100%

Berdasarkan tabel 4.6, bahwa pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan dengan kriteria efektivitas, 39 kegiatan efektivitas berimbang dan 4 kegiatan tidak efektivitas.

Penelitian juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan ditahun 2020. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2020.

Tabel 4 6
Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2020

No	Nama program	Kegiatan	realisasi hasil	rencana hasil	efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	214	367	58,31%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	0	23	0
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	930	930	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	600	600	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1091	1091	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	214	367	58,31%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	30	16,66%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	100%

		Rapar Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	1	1	100%
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	12	12	100%
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	100%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana apartur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2	2	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	50	50	100%
3	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	5	100%
		peningkatan kinerja sumber daya aparatur	5	7	100%
4	program perencanaan, peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	penyusunan rencana strategis dan rencana kerja	2	2	100%
		penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2	2	100%
5	program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	pengendalian kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	1095	1095	100%
		pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	1095	1150	95,21%
		pengamanan sarana perkantoran dan rumah dinas/jabatan	1095	700	156,42
		penyelidikan	1095	144	760,41%

		intelijen			
		pengamanan kegiatan pikada/pileg/pilpres	1	1	100%
6	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	penyuluhan tentang perlindungan masyarakat	1	1	100%
		monitoring pelaksanaan tugas linmas	24	24	100%
		penyelenggara tugas linmas	354	354	100%
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	penyelenggara kegiatan korp musik satpol pp	12	12	100%
		pengawasan petugas tindak internal	120	120	100%
		pemantapan jiwa korsa	1	1	100%
8	program pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan	penyelenggaraan kegiatan pemberkasaan perkara pelanggaran perda	200	200	100%
		monitoring pelaksanaan peraturan daerah	170	170	100%
		penyelenggaraan kegiatan sekretariat PPNS	120	120	100%
9	program pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	pemantauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	115	115	100%
		penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	12	236	508,47%
		penyelenggara kegiatan pemadam kebakaran	1	1	100%
10	program pencegahan penaggulanga	pengembangan sarana dan prasarana	50	50	100%

n kebakaran hutan	pengendalian kebakaran hutan dan lahan			
	pendirian posko lapangan	0	30	0
	pemadaman langsung	1200	1200	100%

Berdasarkan tabel 4.8, bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 kegiatan dengan kriteria efektivitas dan 30 kegiatan efektivitas berimbang dan 6 kegiatan tidak efektivitas.

4.3 Pembahasan Analisis *Value For Money* Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut ini adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas :

Tabel 4 7
Kriteria Ekonomis Tahun 2019 dan 2020

No	kriteria Ekonomis	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kegiatan	Presentase	Kegiatan	Presentase
1	Ekonomis	36	81,8%	33	84,6%
2	Ekonomis berimbang	6	13,6%	5	12,8%
3	Tidak Ekonomis	2	4,5%	1	2,5%

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kanupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 ditahun 2020. Menunjukan terdapat 36 (81,8%) kegiatan di tahun 2019 dan 33 (84,6%) kegiatan yang

memenuhi kriteria ekonomis. Kemudian, 6 (13,6%) kegiatan di 2019 dan 5 (12,8%) kegiatan di tahun 2020 dengan kriteria ekonomis berimbang. Untuk kegiatan yang tidak ekonomis terdapat 2 (4,5%) kegiatan di tahun 2019 dan 1 (2,5%) di tahun 2020.

Serta terdapat kenaikan angka ekonomis dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,8%.

Tabel 4 8
Kegiatan Yang Tidak Ekonomis

No	Kegiatan yang tidak ekonomis	Tahun	
		2019	2020
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana	0%	70,58%
	Pengendalian Kebakaran hutan		
2	Pendirian Posko Langsung	0%	99,02%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	17,22%	0%
	perizinan kendaraan dinas/operasional		

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 dan 2020 memiliki 3 kegiatan yang tidak ekonomis. Pada kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2019 tidak terlaksana atau (0%) namun di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (70,58%). Pada kegiatan pendirian posko langsung tahun 2019 tidak terlaksana atau (0%) kemudian, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (99,02%). Dan pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tahun 2019 dengan presentase (17,22%) mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar (0%) atau tidak terlaksana.

Tabel 4 9

Kriteria Efisiensi Tahun 2019 dan 2020

No	Kriteria Efisiensi	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kegiatan	Presentase	Kegiatan	Presentase
1	Efisiensi	36	81,8%	33	84,6%
2	Efisiensi berimbang	7	16%	5	13,8%
3	Tidak Efisiensi	1	2,5%	1	2,5%

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kabupaten pelalawan tahun 2019 dan 2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 kegiatan ditahun 2020. Menunjukkan terdapat 36 (81,8%) kegiatan ditahun 2019 dan 33 kegiatan ditahun 2020 (84,%) yang memenuhi kriteria efisiensi. Kemudian, 7 (16%) kegiatan ditahun 2019 dan 5 (13,8%) ditahun 2020 dengan kriteria efisiensi berimbang. Untuk kegiatan yang tidak ekonomis terdapat 1 (2,5%) kegiatan ditahun 2019 dan 1 kegiatan ditahun 2020. Serta, terdapat kenaikan angka efisiensi dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (2,8%).

Tabel 4 10

Kegiatan Yang Tidak Efisien

No	Kegiatan yang tidak efisien	Tahun	
		2019	2020
1	Pendirian Posko Lapangan	0	100,98%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona	580,37%	0

Berdasarkan tabel 4.10 pada kegiatan yang tidak efisien terdapat 2 kegiatan ditahun 2020 dan 2019. Dimana pada tahun 2019 pada kegiatan pendirian posko langsung tidak terlaksana atau (0%) namun, pada tahun 2020

terjadi kenaikan dengan presentase (100,98%) lebih 100% dinyatakan efisien. Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional pada tahun 2019 dengan presentase (580,37%) lebih dari 100% dinyatakan efisien. Akan tetapi, terjadi penurunan ditahun 2020 dengan presentase (0%) atau tidak terlaksana.

Tabel 4 11
Kriteria Efektivitas Tahun 2019 dan 2020

No	Kriteria efektivitas	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kegiatan	Presentase	kegiatan	presentase
1	Efektivitas	0	0%	3	7,6%
2	Efektivitas Berimbang	39	88%	30	77%
3	Tidak Efektif	5	11,3%	6	15,3%

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan kegiatan yang dilaksanakan kantor Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020 dengan 44 kegiatan ditahun 2019 dan 39 ditahun 2020. Menunjukkan ditahun 2019 tidak terdapat kegiatan yang efektif atau 0 (0%) kegiatan. Namun, di tahun 2020 terdapat 3 (7,6%) kegiatan. Untuk kriteria efektifitas berimbang terdapat 39 (88%) kegiatan ditahun 2019 dan di tahun 2020 terdapat 30 (77%) kegiatan. Kemudian, kegiatan tidak efektif terdapat 5 (11,3%) pada tahun 2019 dan 6 (15,3%) pada tahun 2020.

Tabel 4 12
Kegiatan yang tidak Efektif Tahun 2019 dan 2020

No	Kegiatan yang tidak efektif	Tahun	
		2019	2020
1	pelayanan jasa surat menyurat	88%	58,31%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60%	0
3	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36,54%	58,30%
4	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	16,66%
5	pengamanan kegiatan pemda dan hari besar	100%	95,21%
6	pendirian posko langsung	100%	0
7	penyediaan alat tulis	98%	100%
9	pemeliharaan rutin/berkala/ perlengkapan/peralatan kantor	50%	100%

Berdasarkan tabel 4.13 pada kegiatan yang tidak efektif terdapat 9 kegiatan. Dimana pada kegiatan pelayanan jasa surat menyurat pada tahun 2019 dengan presentase (88%) terjadi penurunan ditahun 2020 (58,31%). Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di tahun 2019 dengan presentase (60%). kemudian, ditahun 2020 tidak terlaksana atau 0 (0%). Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditahun 2019 dengan presentase (36,54%) ditahun 2020 terjadi kenaikan dengan presentase (58,30%).

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ditahun 2019 dengan presentase (100%) ditahun 2020 mengalami penurunan dengan presentase (16,66%). Kegiatan pengamanan kegiatan pemda dan hari besar ditahun 2019 dengan presentase (100%) ditahun 2020 mengalami penurunan dengan presentase (95,21%). Kegiatan pendirian posko langsung tahun 2019 dengan presentase

(100%) ditahun 2020 terjadi penurunan atau tidak terlaksana (0%). Kegiatan penyediaan alat tulis ditahun 2019 dengan presentase (98%) mengalami kenaikan ditahun 2020 dengan presentase (100%). Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala/perengkapan/peralatan kantor ditahun 2019 dengan presentase (50%) dan tahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase (100%).

Kegiatan yang memenuhi unsur *value for money* hanya tahun 2020 yaitu kegiatan penyelidikan intelijen dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan. Kegiatan inilah yang memiliki pengelolaan organisasi yang paling baik di antara kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan masih berjalan dengan baik.

Banyak kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 yang telah ekonomis dan efisien, namun tidak banyak kegiatan yang bersifat efektif dan memberikan dampak signifikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Kegiatan yang sama dengan 100% berarti memenuhi standar efektivitas berimbang namun, tidak melebihi ekspektasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Hal ini mampu menjelaskan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan hanya ingin memenuhi target tanpa berusaha melewati target yang ditentukan Faktor Penyebab Rasio *Value For Money* pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan adalah :

a. Rasio Ekonomis

Penyebab terjadinya rasio ekonomis tidak memenuhi kriteria ekonomis dikarenakan besarnya realisasi atas belanja yang dikeluarkan oleh kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menunjukkan bahwa instansi ini kurang mampu dalam melakukan memaksimalkan dana anggaran.

b. Rasio Efisiensi

Penyebab terjadinya rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisiensi karena besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, bahkan realisasi belanja melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan meningkatkannya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja instansi ini mengalami penurunan dalam menghemat belanja, atas pendapatan yang diperoleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

c. Rasio Efektivitas

Penyebab terjadinya rasio efektivitas tidak memenuhi kriteria efektif dikarenakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan instansi dalam meningkatkan pendapatan mengalami penurunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek ekonomis menunjukkan presentase nilai 79%. Maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan bersifat ekonomis.
2. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi efisiensi menunjukkan presentase nilai 319,85%, maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan bersifat efisien.
3. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek efektivitas menunjukkan presentase nilai 96%.

Maka dapat dinyatakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersifat tidak efektif.

4. Pada tahun 2019 dan 2020, hanya 2 kegiatan di tahun 2020 yang memenuhi elemen *value for money*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan masih belum memenuhi prinsip *Value For Money*.

5.2 Saran

Saran pada penelitian ini :

1. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan agar dapat memenuhi konsep Value For Money sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan.
2. Bagi peneliti lainnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari objek objek yang memiliki data yang lengkap. Serta melakukan wawancara sehingga mendapatkan informasi dan masalah dalam melaksanakan program-program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2016. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Handoko. 2016. Manajemen Personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Nurmala Sari, Eka. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Medan: Perdana Publishing.
- Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2019-2020.
- Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *e jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200.
- Putri, N. Z. 2020. Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Islam Sunan Ampel.
- Riana Christy Sipahelut, Sri Murni, dan Paulina Van Rate. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI 2014-2016). *Jurnal EMBA*, 5(3), 4425-4434.
- Efriyanti, Farida. Retno Anggraini, Dan Yunus Fiscal. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan Modal Pada PT.Bukit Asam, TBK. *Jurnal akuntansi & Keuangan*, 3(2), 299-316.
- Rempowatu, Jelin dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011- 2014. *Jurnal EMBA*, 4(1), 982-989.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. BPFE : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukur 71 ja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta

Kristanti, Okky irviani. 2016. Analisis Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money*. Yogyakarta.

Solihin, Deni. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value For Money* Pada Politeknik TEDC Bandung. 13(2):102-107.

Wuwungan, Gabriel Thalia. Jantje Tinangon, Dan Sintje Rondonuwu. 2019. Penerapan Metode *Value for money* Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going concer : jurnal riset akuntansi*, 14(4), 354-361.

Kadafi, Laode. 2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang.

Yanti, Novli dan Agus Sutardjo. 2021. Analisis Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018. Sumatera Barat.